

DAFTAR PUSTAKA

1. Data Covid kota Bekasi, Bekasi kota, diakses tanggal 10 April 2020
<https://corona.bekasikota.go.id>
2. DR.dr.Muji Iswanty, SpKK,SH,MH,Mkes.2019, Maladministrasi Medik Dokter dalam perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia, Litera
3. F Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda: Yogyakarta
4. Jabbar, AA, MUI terbitkan fatwa pengurusan jenazah korban Covid, di akses di Jakarta 08 April 2020
[Abi Abdul Jabbar https://www.madaninews.id/.../mui-terbitkan-fatwa-pengurusan-jenazah-korban-covid-19.htm](https://www.madaninews.id/.../mui-terbitkan-fatwa-pengurusan-jenazah-korban-covid-19.htm)
5. Kisah pilu penolakan jenazah perawat corona di Semarang, di akses tanggal 02 Mei 2020
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah-pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang>
6. Kronologi jenazah PDP Covid 19 diambil paksa di RS Bekasi, di akses tanggal 10 Juli 2020
<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kronologi-jenazah-pdp-covid-19-diambil-paksa-di-rs-bekasi/ar-BB15fK3R>
7. Kitab Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran, 2012, Buku Biru, Yogyakarta. Halaman 33
8. Muhammad, SI, 2015, Etika Hukum Kesehatan ,Prenada media grup, Jakarta.
9. Pemkot Bekasi terbitkan aturan tidak tolak pemakaman jenazah Corona, diakses tanggal 04 Juni 2020
<https://jabarnews.com/read/83922/pemkot-bekasi-terbitkan-aturan-tidak-tolak-pemakaman-jenazah-corona>
10. Profil sejarah MUI, di akses tanggal 06 Juni 2020
<https://mui.or.id> Profil sejarah MUI
11. Prof. Dr. Jimly Asshisiqie, S.H. 2017, Peradilan Etik dan Etika konstitusi, Sinar Grafika.
12. Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,SH,MH,LLM. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kharisma Putra Utama, Jakarta. 2016.
13. Santoso,MA ,2012, Hukum,Moral, &Keadilan, Prenada Media Group, Jakarta
14. Wikipedia Covid 19, diakses tanggal 08 April 2020
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19>
15. <https://siplawfirm.id/menolak-pemakaman-jenazah-covid-19-bagaimana-pandangan-menurut-hukum-pidana/> Diakses 04 maret 2020
16. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d>. diakses tanggal 25 Januari 2022

Zulkifly Sanusi, 2022

KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

17. Sulistiarini, Rahmat Hargono. Hubungan perilaku hidup sehat dengan status kesehatan pada masyarakat kelurahan ujung. Vol 6 Nomor 1, 2018. diakses tanggal 30 Januari 2022.
<https://e-journal.unair.ac.id/PROMKES/issue/view/817>
18. Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (analisis yuridis normatif), M. Erfan Riadi,
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/1305/1398> ,
ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010. Di akses tanggal 30 Januari 2022
19. Mendudukan fatwa majelis ulama indonesia sebagai doktrin perundang-undangan, Sarip; Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi. Jurnal legislasi indonesia vol 16 no.3 - september 2019 : 289-298.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/513/pdf>

Zulkifly Sanusi, 2022

KEKUATAN HUKUM MENGIKAT FATWA MUI NOMOR 18 TAHUN 2020 TERKAIT PENOLAKAN PROSES PEMAKAMAN JENAZAH POSITIF CORONA VIRUS DI KECAMATAN JATI ASIH, KOTA BEKASI. PERIODE MARET 2020- DESEMBER 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum Kesehatan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]